

**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI DESA OLOT I KECAMATAN BOLANGITAN BARAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Disusun Oleh :

MOH. SYAFIR VAN GOBEL

NIM. S.21.16.189

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**


2023

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI DESA OLOT I KECAMATAN BOLANGITAN
BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA****Oleh :****MOH. SYAFIR VAN GOBEL****NIM: S2116189****SKRIPSI**


Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
pemerintahan.

Telah Disetujui Dan Siap Diseminarkan
Gorontalo,.....2023


PEMBIMBING I


Marten Nusi, S.IP.,M.AP
NIDN: 0901038502

PEMBIMBING II


Deliana Vitasari Djakaria, S.IP.,M.IP

Mengetahui**Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan****Universitas Ichsan Gorontalo**


Purwanto, S.IP.,M.Si
NIDN:0926096601

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI





PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA OLLOT I KECAMATAN BOLANGITAN BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh:

MOH. SYAFIR VAN GOBEL
S2116189

Telah Dipertahankan Dihadapan Penguji
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Universitas Ichsan Gorontalo

- | | | |
|---|--------|--|
| 1. Marten Nusi, S.IP., M.AP | :..... |  |
| 2. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP | :..... |  |
| 3. Dr. Arman, S.Sos., M.Si | :..... |  |
| 4. Darmawaty Abd Razak, S.IP., M.AP | :..... |  |
| 5. Sandi Prahara, ST., M.Si | :..... | |

Mengetahui



**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Dr. Moch. Sakir. S.Sos, S.I.Pem, M.Si
NIDN: 0913027101



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**
Purwanto, S.I.P., M.Si
NIDN: 0926096601

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Syafir Van Gobel
Nim : S2116189
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judulskripsi : PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA OLLOT I
KECAMATAN BOLANGITAN BARAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada jurusan ilmu pemerintahan dan sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan (S.Ip) benar-benar merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah. Dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah universitas ichsan gorontalo.

Apabila kemudian ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sangsi-sangsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 17 Mei 2023
Mahasiswa




Moh. Syafir Van Gobel
Nim : S2116189

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung” (Q.S Ali-Imran: 173)

Man Jadda Wajada

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya”

(Moh. Syafir Van Gobel)

Segala puji atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat melimpah yang terus diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Persembahan

Teruntuk kedua orang tuaku tercinta :

“MOH. SASLI VAN GOBEL dan YENI PUASA, S.Pd”

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai wujud baktiku yang mungkin tidak seberapa dibandingkan pengorbanan, doa, perjuangan dan kerja keras kalian untuk melahirkan, merawat, membesarkan serta membimbingku hingga detik ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan anaknya dan memberikan pengajaran bermakna dalam hidup, mengajarkan saya menjadi pribadi yang baik, mandiri, dan menjadi kuat untuk segalanya. Semoga Allah selalu memberikan cinta dan kebahagiaan bagi Ibu dan Bapak baik didunia hingga nanti diakhirat kelak.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

Puji syukur kepada ALLAH SWT, karena hanya izin dan kuasanya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**. Sesuai dengan yang direncanakan, Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Usulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : Kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu/mendukung penulis selama ini. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Mochammad Sakir S.Sos,S.I.Pem,.M.Si selaku dekan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bapak Purwanto, S.IP.,M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu pemerintahan. Bapak Marten Nusi S.IP., M.AP pembimbing 1, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Ibu Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP selaku pembimbing 2, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini. Bapak dan ibu dosen yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini. Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk menyempurnakan penulisan usulan penelitian lebih lanjut.Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 17 Mei 2023

Peneliti

Moh. Syafir Van Gobel

ABSTRAK

MOH SYAFIR VAN GOBEL. S2116189. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA OLLOT I KECAMATAN BOLANGITAN BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I, Kecamatan Bolagitang Barat Kabupaten Bolaang Mogondow Utara serta memastikan indikator-indikator pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I, Kecamatan Bolagitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa Ollot I, aparatur desa, dan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I yaitu dengan adanya Peranan pemerintan desa dalam pelaksanaan kebijakan dari warga dalam pembangunan Peningkatan ekonomi, SDM, meningkatkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peranan pemerintahan desa sebagai eksekutor kebijakan. Peranan pemerintahan desa sebagai Pembina. 2) Indikator pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, mengembangkan kegiatan keagamaan, mengembangkan kegiatan kegiatan pemuda pemudih, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Kata kunci: peranan, kepala desa, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT**MOH SHAYFIR VAN GOBEL. S2116189. THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING THE COMMUNITY OF OLLOT I VILLAGE, WEST BOLANGITAN SUB-DISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT**

This study aims to describe the role of the village head in empowering the community of Ollot I Village, West Bolagitang Subdistrict, North Bolaang Mongondow District, and to ascertain the supporting and inhibiting indicators affecting the role of the village head in empowering the community of Ollot I Village, West Bolagitang Subdistrict, North Bolaang Mongondow District. This study is descriptive-qualitative research. The subjects of this study are the Head of Ollot I Village, village officials, and the community. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis is done through data display, data reduction, and conclusion drawing. The results show that: 1) The role of the village head in community empowerment in Ollot I Village can be seen in the policy implementation for the community in economic development, human resources improvement, and development of objectives of village governance. The role of the village government is as a policy executor. The role of the village government is as a coach. 2) The indicator of village community empowerment is one of the efforts to improve the welfare of the community, through several activities, including increasing the development of village economic enterprises, developing village financial institutions, developing religious activities, developing youth activities, and activities that can increase the ability of the community to increase their productivity. Therefore, in developing village communities, especially in the socio-economic field, a leader is needed, in this case, the Village Head, who is expected to function as a source of innovation, coach, direct, and function as a communicator to convey ideas to the village community, in achieving a better level of life.

Keywords: role, village head, community empowerment

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah..... | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1. Pengertian Peran | 6 |
| 2.2. Desa..... | 8 |
| 2.3.Peranan pemerintah desa..... | 9 |
| 2.4. Pembangunan dan pemberdayaan desa..... | 10 |
| 2.5. Peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat | 13 |
| 2.6. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 16 |
| 3.1. Objek Penelitian..... | 16 |
| 3.2. Metode Penelitian. | 16 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 16 |
| 3.4. Informan..... | 17 |
| 3.5. Sumber Data..... | 18 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 18 |
| 3.7. Teknik Analisa Data..... | 19 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 22 |
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Peneltian | 22 |
| 4.2. Hasil Penelitian | 22 |
| 4.2.1 Peran Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat..... | 22 |
| 4.2.2 Peran Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan..... | 23 |
| 4.2.3 Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program-program | 27 |
| 4.2.4 Peran Pemerintah desa sebagai Pembina | 31 |
| 4.3. Pemberdayaan Masyarakat | 35 |
| 4.4. Pembahasan..... | 40 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 45 |
| 5.1. Kesimpulan | 45 |
| 5.2. Saran | 46 |
| DOKUMENTASI | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem dari sentralistik ke Desentralisasi sejukurnya membawa angin segar bagi daerah masing-masing, karena diharapkan akan lahir percepatan pembangunan di daerah yang progresif dengan mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah masing-masing. Hal juga dipandang sebagai dampak positif lahirnya Desentralisasi adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Mulai dari tahapan perencanaan, sampai pada pelaksanaan masyarakat dilibatkan secara langsung guna memenuhi kebutuhan bersama. Maka oleh karena itu sangat dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola atau mengatur dengan baik seluruh tatanan sistem yang ada dalam konsep Desentralisasi sebagai modal dasar dalam penciptaan sumber-sumber ekonomi guna pembiayaan pembangunan.

Pembangunan dalam konteks otonomi daerah lebih mengarahkan pada konsensus bersama antara pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima dampak dari kebijakan pembangunan. Seluruh konsep pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep pemberdayaan dalam konteks kedaerahan lebih cenderung pada arah pembangunan yang berbasis pada masyarakat Desa. Konsep pembangunan masyarakat Desa banyak diarahkan pada

proses pemberdayaan masyarakat seutuhnya dengan pelibatan diri masyarakat pada seluruh proses pembangunan yang dicanangkan.

Lemahnya intervensi pemerintah baik pemerintah Desa, maupun pemerintah Desa dalam hal memainkan perannya guna mewujudkan proses pemberdayaan telah menjadi persoalan klasik dan mendasar pada proses pembangunan masyarakat. Kurangnya peran yang maksimal dari pemerintah menjadikan sasaran pembangunan manusia menjadi terhambat dan di lain sisi berimplikasi pada tidak adanya peningkatan hidup dari masyarakat tersebut.

Kegagalan program pembangunan pedesaan di masa lalu, lebih banyak disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, sehingga terkesan bahwa semua program pembangunan yang dilaksanakan hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan saja.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Pola pemberdayaan masyarakat secara konsep diarahkan pada pelibatan masyarakat sepenuhnya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan di Desa dan itulah yang menjadi tujuan dasar lahirnya

otonomi daerah. Untuk itu, masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan dalam menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah desa dan lembaga lainnya mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Hasil penelitian awal penulis pada pemerintah Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terkait dengan peran pemerintah Desa dalam program pemberdayaan masyarakat menunjukan bahwa arah pembangunan manusia melalui program pemberdayaan belum sepenuhnya di maksimalkan oleh pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat kebijakan pembangunan yang dicanangkan masih seputar masalah infrastruktur dan kegiatan fisik lainnya, dilain sisi dapat lihat bahwa tingkat kemiskinan masyarakat yang Desa Ollot I juga masih meprihatinkan, usaha-usaha ekonomi mikro belum sepenuhnya tumbuh, kurangnya kreatifitas masyarakat dalam mengembangkan diri dibidang ekonomi, serta program-program pemberdayaan lainnya yang masih perlu diarahkan pada proses pemberdayaan.

Berdasarkan hasil pedoman, maka penulis ingin melakukan penelitian, dengan judul **Peranan Pemerintah Desa Dalam UpayaPemberdayakan Masyarakat Di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.**

1.2 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peranan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di era otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai masukan dalam memperluas kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai pengembangan teori yang menyangkut peran kepala desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi kepala Desa Bube Baru, dalam rangka menemukan upaya yang tepat untuk memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan.

3. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para peneliti berikutnya yang ingin meneliti mengenai peran kepala desa dan pemberdayaan masyarakat,

dan juga sebagai pembanding bagi peneliti sendiri mengenai teori yang ada dengan kenyataan di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peranan adalah sikap atau perilaku seseorang yang didambakan dapat membawa perubahan untuk mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas yang ada diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas – tugasnya. Peranan diartikan pada masing – masing ahli yaitu diartikan sebagai sikap yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa sesuatu bagaimana orang itu berperilaku. Faktanya organisasi melakukan identifikasi pekerjaan yang akan dilakukan dan perilaku peran yg diinginkan dan berjalan seiring pekerjaan itu juga mengandung makna harapan mengenai peran urgen dalam mengatur karakter bawahan. Peran pemerintah untuk pembangunan nasional dijelaskan oleh Siagian (2000: 142-150) yaitu pemerintah memainkan peran yang mutlak dalam proses pembangunan. Adapun peranan yang dimaksud adalah peran sebagai :

1. Stbilisator : Usaha yg dilakukan Pemerintah Desa dalam menciptakan keandalan dalam bidang pembangunan.
2. Inovator : Usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam membuat pembaharuan disegala kebijakan pembangunan.
3. Pelopor : Usaha untuk dilakukan Kepala Desa sebagai pelaku terdepan dalam memberikan contoh usaha dalam penerapan pembaharuan pada berbagai bidang pembangunan.
4. Modernisator : Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam berpikir untuk menjadikan pemerintahan mdern demi terwujudnya tujuan pembangunan.

Olehnya pemimpin itu adalah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai pangarah (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan hal yang dibutuhkan dari satu situasidan zaman, sehingga dia mempunyai power dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan dan dukungan dari yang dipimpinnnya, dan mampu menggerakkan anggota ke arah tertentu.

2.2 Desa

Desa sebagai kumpulan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus keinginan masyarakatnya dengan latar asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat pedesaan.

Desa adalah tempat tinggal beberapa orang atau sebagai warga hukum dan wilayah daerah kesatuan keteraturan, wujud sebagai tempat tinggal beserta tanah pertanian, daerah lautan, tanah sawah, tanah adat, hutan blukar, akan juga wilayah yang berada di tepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang kesemuanya merupakan wilayah yang dikuasai oleh Hak warga Masyarakat Desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa :
 “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan warga hukum yang mempunyai struktur pemerintahan terendah secara langsung ada dibawah Camat dan berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (PU Undang-undang No. 32 Tahun 2004).

Dengan demikian disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan warga yang memiliki sudah batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.3 Peranan Pemerintah Desa.

Peranan Pemerintah dalam struktur masyarakat desa begitu besar. Hal ini karena banyaknya desa-desa di Indonesia dimana masyarakat masih bercorak paternalistik. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang diarahkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah desa adalah pedoman dan contoh langsung bagi bawahannya agar melaksanakan tindakan yang sama. Pemilihan kepala desa, mempunyai power dan wewenang yang luar biasa untuk mengatur warganya.

Kepala desa adalah ukuran bagi warga yang ada di desa. Agar kepala desa mampu menjaga kekuasaan dan wewenangnya, kepala desa selalu memperkuat legitimasi atau kedudukannya dengan cara menjadikan dirinya secara geneologis, kepala desa sejak tahun 1950-an juga memanfaatkan berbagai kekuatan sosial politik, seperti partai politik. Semasa Orde Baru, demi berdirinya legitimasi kedudukannya, para kepala desa menjadikan dirinya dengan partai Golongan Karya (Golkar). Oleh karena itu, tidak aneh bila golongan karyawan memiliki kemenangan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Mereka memiliki target kemenangan di wilayahnya. Ini nampaknya sebagai balasan atas keterkaitannya Golkar yang telah menguatkan kedudukannya pada kekuasaan. Dalam tahapan pembangunan desa, peranan pemerintah desa juga sangat besar.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan peranan kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kebanyakan pemerintah desa memiliki wewenang yang betul-betul ada. Mereka bagaikan penguasa kecil di desanya. Hal itu ditambah sikap warga masyarakat dengan bersifat paternalistik. Kedua, pemerintah desa

mempunyai kedudukan yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini karena kepala daerah yang membuat kebijakan akhir dan memberi surat pengangkatannya, meskipun pada akhirnya kepala desa dipilih oleh masyarakat secara langsung.

2.4 Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat yaitu pembangunan yang memberi kesempatan pada masyarakat agar dapat berperan dalam mengarahkan sumber daya (*resources*) dimilikinya, baik sumber daya material maupun non material, terutama SDMnya sendiri untuk bersikap mandiri. Dengan kata lain warga mempunyai akses dalam pengambilan kebijakan sampai implementasi pembangunan. Model pembangunan yang tertumpuk pada masyarakat lebih menekankan pada pemberdayaan, yang menilai inisiatif kreatif dari rakyat adalah sumber daya pembangunan yang penting dan memandang kesejahteraan aspek materiil mereka sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan.

Telah banyak program pengembangan masyarakat pedesaan dijalankan di berbagai pelosok Indonesia sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Namun demikian, suatu paradigma yang belum terumuskan adalah konsep pengembangan masyarakat pedesaan yang spesifik dengan mempertimbangkan pola-pola pengambilan keputusan yang berkembang dalam masyarakat tersebut.

Siagian (2006:2) mengatakan bahwa konsep membangun adalah suatu sistem rangkaian usaha atau perkembangan sederhana yang dilaksanakan dalam keadaan sadar oleh komponen bangsa, negara, dan pemerintahan mengarah pada modern dalam rangka pembinaan warga bangsa.

Kemudian menurut Tjokromidjojo (2005:113) pembangunan adalah proses perbaruan yang kontinue atau terus menerus dari suatu kondisi tertentu pada suatu keadaan yang jauh lebih baik.

Menurut Marbin (2002:113) bahwa pembangunan wilayah desa adalah serangkaian pelaksanaan yang berlangsung di wilayah pedesaan yang meliputi seluruh bentuk kehidupan pada masyarakat, dilaksanakan secara terfokus dengan kebijakan pengembangan swadaya bersama warga yang ada. Pembangunan desa ditujukan untuk memaksimalkan secara optimal potensi sumber daya dan guna pengembangan SDMnya dengan melalui aspek kualitas hidup, peningkatan keterampilan, peningkatan prakarsa, dimana melalui bimbingan dan bantuan dari aparat pemerintah yang sesuai dengan pembagian tugas-tugasnya.

Menurut Sudriamunawar (2008:15) pembangunan dapat berarti upaya perubahan mengarah pada keadaan lebih baik berdasarkan pada nilai atau kaidah tertentu, formula penggunaan potensi alam, manusia, serta sosial budaya.

Menurut Adisasmita (2008:19) bahwa konsep pembangunan desa dilaksanakan melalui pendekatan secara holistik, partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berpikir lingkungan dan berkelanjutan serta melakukan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara

serasi dan sejlandan bersinergis, sehingga tercapai tujuan. Ada tiga prinsip pokok pembangunan desa, yaitu:

1. Kebijakan dan metode pembangunan di setiap desa mengarah kepada pencapaian pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga komponen Trilogi Pembangunan tersebut yakni (a) konsep kesamaan pembangunan, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup maksimal, dan (c) kestabilan yang sehat dan cukup, diaplikasikan di setiap lini, termasuk desa dan kelurahan, pada setiap wilayah maupun antara wilayah yang saling terkait, serta dikembangkan secara searah dan terfokus.
2. Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan melalui pendekatan prinsip pembangunan yang berlangsung terus. Pelaksanaan prinsip pembangunan yang terus menerus mengharuskan setiap daerah lebih mengandalkan potensi alam yang terkini sebagai modal pertumbuhan. Selain itu setiap desa perlu menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) secara penuh, menjadikan modal fisik, prasarana dan alat lainnya, serta peralatan baik mungkin.
3. Memaksimalkan efisiensi pada masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi serta desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ialah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan yang diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

2.5 Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat

Adapun peran dari pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat menurut Ulumiah (2012:4) adalah sebagai berikut:

1. Peranan pemerintan desa dalam pelaksanaan kebijakan

Pada pemerintahan desa, kepala desa dan LPMD saling bekerjasama serta saling membantu untuk menyusun rencana pembangunan dengan berpatokan pada perbaikan kualitas hidup masyarakat desa. Usaha dalam mencapai tujuan serta sasaran pembangunan, olehnya penetapan alur pikiran sebagai suatu upaya dalam pemberdayaan masyarakat olehnya masyarakat akan lebih terdepan, adanya kesejahteraan dan mandiri.

Kalaborasi yang dilaksanakan antar pemerinrah desa bersama LPMD berupaya penyusunan konsep pembangunan yang menghasilkan sebuah keputusan. Diantara kebijakan yang dapat direncanakan dalam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Mengaktifkan peran dari warga dalam pembangunan
- b. Peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pada (SDM)
- c. Peningkatan pemberdayaan perangkat desa dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Peranan pemerintahan desa sebagai eksekutor kebijakan.

Awal membuat program-program pembangunan, pemerintah desa melaksanakan musyawarah di tingkat RT/dusun dalam rangka membahas semua agenda kegiatan dari tingkat Bawah. selanjutnya dilanjutkan pada musyawarah desa yang diikuti oleh para tokoh masyarakat dan lainnya.

3. Peranan pemerintahan desa sebagai pembina

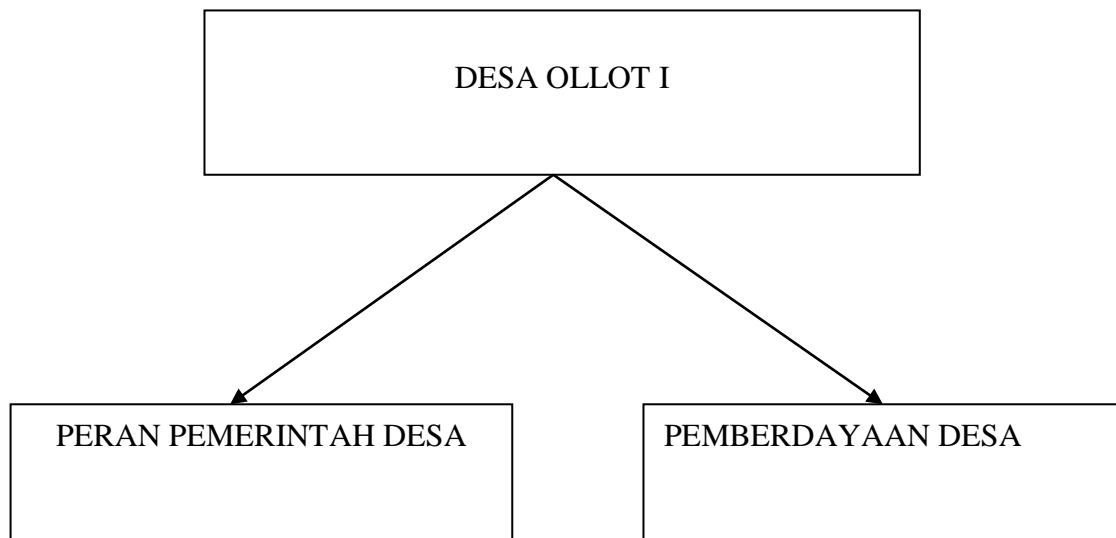
Pemerintah desa mempunyai peranan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan pembinaan, dimana adanya pembinaan diharapkan warga desa termotivasi untuk ikut turut serta pada setiap kegiatan yang bertujuan pemberdayaan masyarakat.

Menurut *United Nations* (dalam Tampubolon, 2006:83) arah utama pemberdayaan masyarakat yaitumewujudkan rasa percaya diri masyarakat dan dimana itu merupakan modal penting masyarakat untuk bersama. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari pemerintahan desa untuk meningkatkan pemberdayaanserta meningkatkan sejahteranya masyarakat desa dicapai melalui pembinaan pada setiap bidang. Melalui pembinaan diinginkan masyarakat dapat menjadi mandiri sertabisa menyokong dirinya untuk tidak terjatuh ke pada posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawah masyarakat kearah tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk itu, pemerintah desa sebagai penanggung jawab di wilayahnya, tentunya memiliki peran yang sangat penting untuk memberdayakan masyarakatnya. Dari uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Peranan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3.2 Metode penelitian

Penelitian ini menjadikan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai pendekatannya. Menurut Nazir (2006:3), metode deskriptif yaitu suatu metodologi untuk penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang.

Menurut Koentjaraningrat (1990:29) bahwa penelitian dengan sifat kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara baik karakter suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala pada masyarakat.

3.3 Fokus penelitian

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

Peranan pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari :

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan
2. Peran pemerintan desa sebagai pelaksana program-program
3. Peran pemerintah desa sebagai Pembina.

3.4 Informan

Informan dalam penelitian ini ialah individu/orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan secara purposif (penentuan informan dengan pertimbangan tertentu). Adapun informan dalam penelitian ini:

| NO | INFORMAN | PERTANYAAN |
|----|------------------|---|
| 1 | KEPALA DESA | -Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan selama ini -Bagaimana komunikasi bapak dengan bawahan selama bertugas -Apa kendala bapak selama menjalankan tugas dipemerintahan desa |
| 2 | KASIE PEMERINTAH | -Bagaimanakah peran kepala desa selama ini dalam pembangunan desa -Sejauh mana peran kepala desa dalam program pemberdayaan -Adakah program pemberdayaan yang dimasukan sebagai bagian dari rencana pembangunan didesa -Apa saja program pemberdayaan didesa yang dicananngkan selama ini -Bagaimana peran Konunikasi kepala desa selama ini dengan bawahan atau masyarakat |
| 3 | UNSURE BPD | -Bagaimanakah peran kepala desa selama ini dalam pembangunan desa -Sejauh mana peran kepala desa dalam program pemberdayaan -Adakah program pemberdayaan yang dimasukan sebagai bagian dari rencana pembangunan didesa -Apa saja program pemberdayaan didesa yang direncanakan selama ini -Bagaimana peran Konunikasi kepala desa selama ini dengan bawahan atau masyarakat |

| | | |
|---|------------|--|
| 4 | MASYARAKAT | -Sejauh mana bapak/ibu mengetahui program pemberdayaan yang ada didesa -Apakah bapak/ibu mendapatkan program pemberdayaan dari desa -sejauh mana bapak/ibu melihat adanya peran kepala desa dalam program pemberdayaan |
|---|------------|--|

3.5 Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui wawancara.
2. Sumber data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

3.6 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di lapangan, khususnya data primer, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- a. Wawancara mendalam, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melalui tanya jawab kepada informan untuk menggali lebih jauh terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi atau pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Tahap awal observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan yang bersifat umum,

yaitu memahami kegiatan yang terjadi dan dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

- c. Dokumentasi, yaitu metode untuk menjaring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2007:91) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

- a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat dan didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif

adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkai, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. Data display

Setelah data direduksi, untuk langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga pada analisis data kualitatif menurut Mile dan Huberman dalam Sugiyono (2007:99) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulannya awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian



Gambar Lokasi Desa Ollot I

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat dengan fokus pembangunan seutuhnya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui dimensi kebijakan pembangunan. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi focus pembangunan manusia adalah melalui program pemberdayaan. Pemberdayaan telah menjadi pilihan kebijakan yang konkrit bagi pemerintah, karena memiliki dampak yang langsung pada kehidupan masyarakat.

Kepala Desa adalah agen perubah diwilayah pedesaan dengan segala kewenangannya mampu merencanakan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan secara maksimal dan berkesnimbangan.

Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga peranan, yaitu peran pemerintan desa sebagai pelaksana kebijakan, peran pemerintan desa sebagai pelaksana program-program, dan peran pemerintah desa sebagai pembina.

4.2.2 Peran Pemerintah Desa Sebagai Pelaksana Kebijakan.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pemerintahan Desa, unsur-unsur yang terlibat sebagai mitra kelembagaan Desa bersama-sama untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan yang mengarah oada perbaikan hidup masyarakat.

Dari program pemberdayaan masyarakat yang berhasil dirumuskan dalam musrengbang Desa Ollot I, kepala desa dapat dikatakan dapat bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan kepala desa Ollot I (21 September 2022) dimana dikatakan bahwa:

“Dalam hal menjalankan pemerintahan, kehadiran pemeritah desa dalam setiap momen bersama masyarakat akan sangat membantu dan memotivasi masyarakat untuk hadir dan turuyt serta membangun desa. Peran dalam kontes ini menurut saya adalah hal terpenting yang kami dari pemerintah desa kembangkan dan komitmen akan hal tersebut”

Dari informasi yang dikatakan oleh informan di atas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perannya selaku pelaksana kebijakan, kepala desa Ollot I dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena dapat menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbang) sebagai sarana pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa, di mana hasil keputusan yang

diambil dalam kegiatan tersebut adalah merupakan program kegiatan yang diperuntukkan kepada program pembangunan desa ke depan.

Hal ini juga dipertegas oleh ketua BPD (September 2022) yang mengatakan:

“Iya, dapat dilihat dari musrenbangda baru-baru ini, dimana kami mengorganisir siapa yang harus hadir dalam kegiatan tersebut agar semua kebutuhan masyarakat bisa disampaikan dalam kegiatan itu”.

Keberadaan pemerintahan desa adalah unsur yang paling dekat dengan masyarakat dimana pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan Desa. Untuk itu, kepala desa harus melibatkan semua pihak dalam kegiatan musrenbang agar program yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut mendapat dukungan yang dari masyarakat.

Di samping itu, kepala desa Ollot I juga dapat melakukan kerja sama dengan baik pada tokoh masyarakat yang tentunya mempunyai akses yang cukup tinggi pada masyarakat di dusunnya masing-masing. Sebagaimana dikatakan oleh (Kaur pembangunan, 22 September 2022) yang mengatakan bahwa:

“Iya, tapi tentunya dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat karena dari mereka didapat informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat”.

Tentunya kita memahami bahwa program pemberdayaan masyarakat diperlukan agar setiap kegiatan pembangunan di desa mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan peran seorang figur yang memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan salah

komponen penting dalam kepemimpinan di desa, karena pemikiran dan perkataan mereka sering didengar oleh masyarakat di sekitarnya. Respon yang agak berbeda disampaikan seorang informan dari masyarakat, (23September2022) yang mengatakan bahwa:

“ya tetapi kurang koordinasi yang baik, seperti dalam dalam menyusun kebijakan melalui musyawarah desa, banyak tokoh masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut, akibatnya banyak kebutuhan masyarakat tidak disampaikan dalam musyawarah tersebut”.

Proses pemberdayaan masyarakat seharusnya dilakukan secara kolektif (bersama), antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat. Untuk itulah kepala desa telah mengambil beberapa kebijakan yang dianggap sebagai upaya yang maksimal dalam program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Desa Ollot I (23 September2022), yang mengatakan kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah:

“Melibatkan secara maksimal dalam hal pembangunan di desa dalam bentuk kepanitiaan maupun partisipasi langsung dalam bentuk tenaga maupun dana. Untuk itu program pembangunan yang dirancang seperti, mengaktifkan semua kelembagaan masyarakat yang ada di desa Ollot I, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Senada dengan yang diungkapkan oleh informan di atas, informan lain yang juga merupakan Ketua BPD (26September2022) mengatakan hal yang hampir sama, yakni:

“Melibatkan secara maksimal dalam hal pembangunan di desa dalam bentuk kepanitiaan maupun partisipasi langsung dalam bentuk tenaga maupun dana, karena tugas lembaga pemberdayaan masyarakat memastikan masyarakat ikut

dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Kebijakan lain tentang pemberdayaan masyarakat berasal dari pemerintah desa, kami hanya mendukungnya saja”.

Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai institusi. Olehnya pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan potensi dari masyarakat melalui metode dorongan yang kuat untuk membangkitkan kesadaran sehingga mereka dapat menyadari potensi masing-masing. Salah satunya dalam bentuk kegiatan gotong royong, seperti yang dikatakan oleh (Kaur pembangunan, 27 September 2022) bahwa kebijakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan:

“gotong royong, kerja bakti. Ini kegiatan pemberdayaan yang pemerintah desa lakukan, karena di desa ini ada kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh pemerintah kabupaten”.

Atau kegiatan lain seperti yang dikatakan oleh (Kaur Umum, 24 September 2022):

“kebijakan pembagian raskin, menggalakkan kegiatan gotong royong masyarakat dan kegiatan pembinaan pemuda desa”.

Dapat juga dilakukan dengan kegiatan dialog, sebagaimana dikatakan oleh (masyarakat, 26 September 2022):

“biasanya hanya berupa himbauan untuk menyukseskan kegiatan pembangunan, itupun yang sampaikan hanya tokoh masyarakat dan sebagian warga masyarakat yang menyampaikan dari mulut ke mulut mengenai himbauan kepala desa”.

Dengan demikian banyak upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, baik melalui penanaman nilai kesadaran

dan kecintaan pada desanya, serta dalam wujud kegiatan fisik berupa kegiatan gotong royong dalam setiap kegiatan pembangunan desa.

4.2.3 Peran pemerintah desa sebagai pelaksana program-program

Lembaga pemerintahan Desa Ollot I pada awal pembuatan program pemberdayaan masyarakat, selalu mengawalinya dengan perencanaan dari tingkat Dusun dngan melibatkan warga masyarakat setempat. Kemudian melanjutkan apa musyawarah diatasnya yaitu musyawarah Desa dengan melibatkan seluruh komponen Desa, khususnya masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan mengenai sebelum membuat program pemberdayaan, telah diawali dengan meminta masukan (musyawarah) di tingkat dusun, Kepala Desa Ollot I (, 27 September 2022) mengatakan:

“ya. Tentu saja, karena dalam musrenbang tingkat desa yang diminta semua persoalan atau kebutuhan masyarakat perdesun untuk disampaikan ke pemerintah desa. Dari masukan dusun tersebut nantinya akan dipilih mana program yang harus didahulukan karena sangat mendesak untuk diselesaikan. Pemilihan program ini dilakukan karena anggaran yang dimiliki desa sangat terbatas, jadi kita pilih yang paling prioritas dulu”.

Informasi yang disampaikan oleh kepala desa di atas, juga dikatakan oleh Ketua BPD (28 September 2022) bahwa:

“ya karena disana lah sumber masalah dalam pembangunan dan dusun juga merupakan lokasi pembangunan fisik. Dengan demikian sebelum musrenbang, kami minta setiap kepala dusun atau tokoh masyarakat untuk berdialog dengan masyarakatnya apa yang akan dibangun atau diperbaiki”.

Kemudian informasi di atas diperkuat oleh (Kaur Umum, 29 September 2022) dengan mengatakan bahwa:

“Ya, sebelum melaksanakan kegiatan musyawarah desa, kepala desa meminta kepala dusun untuk mengkoordinir kegiatan di dusunnya masing-masing dengan meminta masukan dari warganya mengenai apa yang mereka akan bangun di dusunnya masing-masing, agar dalam pelaksanaannya nantinya mendapat dukungan dari masyarakat tersebut”.

Jika dikaitkan dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa Ollot I telah melaksanakan konsep pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan dari bawah. Untuk itu, kepala desa hendaknya memastikan bahwa dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa, semua pihak harus dimintai gagasan awalnya agar semua kebutuhan masyarakat dapat ditampung, sebagai acuan dalam membuat program pemberdayaan masyarakat desa. Kalau ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, maka mereka akan bersikap tidak peduli pada program pemberdayaan yang dirumuskan pemerintah desa bersama lembaga pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan yang lain mengatakan bahwa masih ada masyarakat tidak dilibatkan dalam merumuskan rencana program pemberdayaan di tingkat dusun, sebagai dikatakan oleh (masyarakat, 25 September 2022) yang mengatakan bahwa:

“saya kurang tau, karena saya tidak pernah diundang kalau ada musyawarah di tingkat dusun, mungkin hanya ketua RT atau ketua RW dan tokoh masyarakat saja yang diundang”.

Hal yang sama dikatakan oleh (masyarakat), 25 September 2022

“Saya kurang tau, mungkin ada. Yang jelas saya tidak pernah mendapat undangan untuk kegiatan itu, bahkan mendengar saja ada rapat untuk membuat rencana kegiatan pembangunan di dusun kami, saya tidak pernah mendengarnya”.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat banyak disebabkan karena program tersebut merupakan gagasan dari masyarakat desa itu sendiri, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mendapat respon dan dukungan yang besar dari masyarakat. Olehnya itu, pemerintah desa sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa sebagai wadah untuk menggali gagasan dari masyarakat, harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengungkapkan semua permasalahan atau apa yang dibutuhkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hasil wawancara dengan informan mengenai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memberi gagasan untuk program pemberdayaan dalam musyawarah pembangunan desa, pada umumnya mengatakan bahwa masyarakat sudah diberik kesempatan yang luas untuk mengemukakan gagasannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Ollot I (27 September2022) yang mengatakan:

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun. Paling banyak melalui perwakilan oleh kepala dusunnya atau tokoh masyarakat yang ditunjuk, atau bisa juga masyarakat datang langsung ke musrenbang untuk menyampaikan keluhannya, juga tidak dilarang”.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ketua BPD (28September2022):

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun, tetapi tidak semua karena hanya sebagian kecil saja masyarakat yang suka menyampaikan unek-uneknya, yang lain hanya mewakilkan kepada kepala dusun atau tokoh masyarakat mereka”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh (Kaur pembangunan, 23 September 2022) yang mengatakan:

“ya semua diberi kesempatan yang untuk menyampaikan gagasannya, tetapi masyarakat lebih cenderung mempercayakannya kepada kepala dusun atau tokoh masyarakat mereka di dusun”.

Olehnya itu pembangunan desa dalam setiap prosesnya baik dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun pada organisasi yang ada pembangunan desa harus mengedepankan aspek prosedural dan pendekatan partisipatif selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terdapatnya partisipasi masyarakat secara maksimal. Partisipasi masyarakat desa dalam hal ini yaitu termasuk didalamnya upaya memperoleh gagasan-gagasan baru atau inovasi wujud dari kebiasaan masyarakat ikut serta pada proses pengambilan kebijakan pembangunan desa.

Walaupun memang harus diakui bahwa semua gagasan yang diungkapkan oleh masyarakat tidak harus diwujudkan, namun setidaknya ada penjelasan dari pemerintah desa atau lembaga pemberdayaan masyarakat untuk menjelaskan mengapa gagasan mereka belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena ketersediaan anggaran yang terbatas, sehingga harus diberlakukan skala prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah timbulnya respon negatif dari masyarakat mengenai itikad dari pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan yang merupakan warga masyarakat, (masyarakat, 2 Oktober2022) mengatakan:

“ya masyarakat dilibatkan dalam memberikan gagasan yang bersifat membangun, hanya masukan yang diberikan jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat”.

Untuk itu, kepala desa harus meningkatkan koordinasi antar warga secara rutin supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara pimpinan dengan bawahan, tentunya melalui tokoh masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman atas penyampaian gagasan warga yang belum bisa diwujudkan. Dalam hal ini, peran kepala desa dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat begitu menentukan terlaksananya setiap program pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Olehnya kemampuan ini harus bisa dilaksanakan dan dilasnakan oleh seorang kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

4.2.4 Peran Pemerintah Desa sebagai Pembina

Kepala desa mempunyai posisi atau kekuasaan yang besar dalam memberikan perannya untuk pemberdayaan masyarakat. Olehnya itu, siapapun yang dipercayakan sebagai pembuat kebijakan pemberdayaan masyarakat, akan berperan sebagai perantara antara apa yang sudah ada di masyarakat dengan apa yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan. Posisi kepala desa sebagai perantara harus bisa menjadi seorang yang tanggap terhadap permasalahan yang timbul di daerah kekuasaannya mencakup pembangunan baik yang berupa fisik maupun non fisik, dan harus bisa memediasi dan mencari solusi dalam setiap permasalahan atau konflik yang ada dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa integritas.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai kemampuan pemerintah desa melakukan fungsi pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa Ollot I (2 Oktober 2022) mengatakan:

“ya, tentunya dengan dibantu oleh para kepala dusun dan tokoh masyarakat karena biasanya masyarakat lebih dekat dengan mereka. Pemerintah desa juga sering menyampaikan pada saat ada kegiatan desa dimana kepala desa diminta untuk berbicara, saya selalu mengingatkan terus mengenai pentingnya dukungan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena tanpa itu semuanya pasti akan bermasalah”.

Demikian juga yang dikatakan oleh Ketua BPD (5 Oktober2022):

“ya bisa, tetapi tentunya dengan dukungan semua pihak karena tidak mungkin kepala desa melakukannya seorang diri, apalagi warga masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor desa, sangat jarang datang ke kantor desa”.

Dari informasi yang diberikan oleh dua informan di atas dapat dikatakan bahwa kepala desa dapat melakukan pembinaan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan. Kepala desa juga berkoordinasi dengan para tokoh masyarakat untuk menyampaikan hal yang kepada masyarakat karena persoalan lokasi dusun yang jauh dari pusat desa.

Namun informasi yang agar berbeda disampaikan oleh beberapa informan bahwa kepala desa belum begitu maksimal dalam melaksanakan perannya selaku peminadalam program pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Elvia Ismail (Kaur pembangunan, 5 Oktober2022) yang mengatakan:

“ya, walaupun mungkin belum maksimal. Selama ini pemerintah desa berusaha melakukan pembinaan lewat kegiatan sosialisasi untuk menanamkan rasa kecintaan masyarakat pada desanya”.

Demikian pula yang dikatakan oleh informan berikut, (masyarakat, 3 Oktober 2022) bahwa:

“saya kira masih kurang, karena kesadaran pada semua warga masyarakat tidak terjadi, maksudnya masyarakat hanya mau kerja bakti kalau kegiatan itu berlangsung di dusunnya”.

Dan pernyataan yang sama dikemukakan oleh (masyarakat, 3 Oktober 2022)

“tidak dapat, karena semangat gotong royong masyarakat tidak berkelanjutan atau tidak menimbulkan kesadaran pada masyarakat bahwa itu merupakan tanggungjawab mereka. Masyarakat hanya mau bekerja gotong royong kalau kegiatan pembangunan desa itu dilaksanakan di dusunnya saja, kalau di dusun lain, mereka tidak mau”.

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kepala desa belum begitu maksimal dalam melaksanakan perannya selaku pembina dalam program pemberdayaan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat tidak maksimal dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat karena semangat gotong royong masyarakat tidak berkelanjutan atau tidak menimbulkan kesadaran pada masyarakat bahwa itu merupakan tanggungjawab mereka.

Salah satu sasaran pokok pemberdayaan masyarakat desa ialah memberantas atau setidaknya-tidaknya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup yang lebih layak. Oleh karena itu, pembangunan desa harus melibatkan sebagian besar masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas utama kepala desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk berupaya semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat dalam setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Hasil wawancara dengan Ketua BPD (6 Oktober 2022) mengatakan bahwa:

“ya, setiap program pembangunan desa yang dilaksanakan banyak masyarakat yang turut ambil bagian dalam bentuk gotong-royong atau kerja bakti bersama.”.

Maksud dari pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas bahwa salah satu bukti pemerintah desa dapat memperdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari tingkat keikutsertaan masyarakat ketika sebuah program dilaksanakan. Hal ini terjadi karena sebagian besar program pemberdayaan masyarakat merupakan saran dan gagasan masyarakat ketika dilaksanakan musyawarah pembangunan desa, sebagai dikatakan oleh salah seorang informan (Kaur Umum, 6 Oktober 2022) bahwa:

“ya, karena pada umumnya program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, semuanya adalah saran dari masyarakat melalui kepala dusunnya atau tokoh masyarakat yang ditunjuk”.

Kedudukan yang strategis yang dimiliki oleh kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaran pembangunan desa. Seorang kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa harus bisa dan benar-benar dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Untuk itu, kepala desa harus mampu dan bisa merealisasikan tujuan pembangunan dengan senantiasa selalu berkordinasi dengan semua komponen terkait di desa dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program tersebut, agar masyarakat dapat diberdayakan dalam pelaksanaan program yang dimaksud. Hasil wawancara dengan informan menyangkut pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan

masyarakat desa dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, (masyarakat, 5 Oktober 2022) mengatakan:

“ya, tetapi kurang maksimal karena hanya masyarakat yang dekat lokasi kegiatan saja yang terlibat di dalamnya, kalau masyarakat dari dusun lain jarang yang ikut terlibat, karena berpikir lebih melakukan pekerjaan lain”.

Senada dengan informan di atas, (masyarakat, 5 Oktober 2022) juga mengatakan:

“kurang dapat memberdayakan masyarakat secara keseluruhan karena banyak warga yang tidak ikut gotong royong apabila ada kegiatan pembangunan fisik dibandingkan dengan yang ikut. Mereka lebih baik bekerja untuk mencari pendapatan karena pelaksanaan kegiatannya bukan hari libur”.

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh informan di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa kurang dapat memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, karena kegiatan sosialisasi yang dilakukan juga kurang maksimal dalam menanamkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat mengenai posisi mereka dalam setiap program pemerintah desa. Akibatnya adalah tidak semua warga masyarakat ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan karena kegiatan tersebut tidak dilakukan di dusunnya, padahal kegiatan tersebut tetap dilakukan di dusun yang merupakan wilayah Desa Ollot I, sehingga tidak ada alasan untuk tidak ikut serta.

4.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari obyek yang diberdayakan. Karena itu pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk terus menerus meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam pengertian sehari-hari, pemberdayaan masyarakat selalu dikonotasikan sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah yang umumnya dinilai tidak berdaya. Hal ini dilakukan agar masyarakat tersebut memiliki rasa percaya diri masyarakat untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.

Hasil wawancara mengenai pemerintah desa dapat membangun rasa percaya diri masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, jawaban yang diberikan informan cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Ollot I (, 2 Oktober 2022) yang mengatakan:

“ya, itulah tujuan pembinaan yang kami lakukan agar masyarakat sadar dan memiliki rasa percaya diri yang kuat tentang potensi yang mereka miliki, dan tanpa keikutsertaan mereka maka tujuan program pemberdayaan tidak akan tercapai”.

Demikian juga yang dikatakan oleh mitra kepala desa, Ketua BPD (Oktober 2022) bahwa:

“ya, karena setiap kegiatan pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat menimbulkan kepercayaan diri pada masyarakat bahwa mereka mampu menyelesaikan kegiatan tersebut”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sudah dapat memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat bahwa

berhasil tidaknya semua program pembangunan di desa mereka sangat tergantung kepada keikutsertaan dan kontribusi mereka dalam pelaksanaan program tersebut. Kemajuan desa mereka berada ditangan mereka sendiri, bukan orang lain, sehingga mereka tidak perlu bergantung kepada orang lain.

Namun tanggapan yang berbeda datang dari informan warga masyarakat, yang melihat program pemberdayaan masyarakat belum mampu membangun rasa percaya diri masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh (masyarakat, Oktober 2022) bahwa:

“kurang dapat membangun rasa percaya diri karena tidak semua ikut dalam kegiatan pembangunan, karena kurang yakin kalau itu untuk kepentingan mereka”.

Keterangan informan di atas diperkuat oleh (masyarakat, Oktober 2022) yang mengatakan bahwa:

“kurang dapat karena walaupun mereka ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat itu maka tidak memberikan perubahan yang berarti pada diri mereka. Masyarakat maunya kegiatan pemberdayaan itu berupa pelatihan keterampilan kerja supaya mereka dapat gunakan untuk membuka usaha mandiri, misalnya pelatihan keterampilan bidang perbengkelan, jahit menjahit, koperasi dan lain-lain”.

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan di atas dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan kurang mampu membuat masyarakat memiliki kepercayaan diri karena program pemberdayaan yang dilakukan kurang dapat memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan ekonomi mereka. Yang mereka inginkan adalah program pemberdayaan yang dapat memberikan keterampilan khusus agar bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ollot I (Oktober 2022) memang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih lebih cenderung

pada pembentukan sikap untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, belum mengarah pada kegiatan untuk memberikan bekal keahlian kepada masyarakat, sebagaimana dikatakan sebagai berikut:

“pembinaan seperti kunjungan ke dasa wisma, dan ke masjid-masjid atau apabila ada kegiatan-kegiatan hajatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa Ollot I juga melakukan kegiatan pembinaan karang taruna atau kepemudaan, pembinaan dalam bidang keagamaan bekerja sama dengan para tokoh agama, dan pembinaan dalam bidang keamanan untuk menjaga desa”.

Pernyataan ini juga dipertegas oleh ketua BPD (Oktober 2022) bahwa:

“kepala desa dengan lembaga pemberdayaan masyarakat lebih banyak melakukan pembinaan pada generasi muda di daerah ini agar bisa produktif sehingga tidak terlibat dalam perbuatan negatif. Juga pembinaan dalam bidang keagamaan dan keamanan desa”.

Masyarakat memiliki wewenang dan hak untuk menentukan usaha apa yang akan dikembangkan, karena masyarakat lokal lebih mengetahui kondisi dan potensi daerah mereka. Pemerintah sebagai fasilitator berkewajiban untuk memberikan dukungan, pengetahuan, pengajaran, dan penyuluhan kepada masyarakat demi kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus selalu memberikan pendampingan kepada masyarakat agar sumber daya alam dan sumber daya manusianya dapat dikembangkan dengan maksimal.

Tanggapan dan harapan disampaikan oleh warga masyarakat selaku informan, (masyarakat, Oktober 2022) mengatakan bahwa:

“paling banyak hanya pada generasi muda saja, dan itupun hanya pembinaan menyangkut tanggungjawab mereka terhadap pembangunan desa, padahal lebih baik lagi kalau ada program pembinaan yang mengarah pada peningkatan keterampilan khusus, misalnya kursus agar pemuda tersebut memiliki keterampilan untuk menghasilkan pendapatan”.

Dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat belum bisa memberikan dampak perubahan yang positif pada perbaikan ekonomi keluarga masyarakat desa. Oleh sebab itu, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya juga diarahkan pada peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat desa, agar mereka juga bisa berdaya untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga masing-masing.

Dari program pemberdayaan yang dikemukakan di atas, tampaknya belum menandakan program pemberdayaan yang diimpikan oleh masyarakat. Pemerintah desa hendaknya jangan memandang masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan semata, belum sebagai subyek yang ikut menentukan program pembangunan yang mereka inginkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah desa semakin besar. Pemerintah desa berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini, tentunya masyarakat desa yang seharusnya memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi terbelenggu dalam berinovasi.

Apapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk

merubah masyarakat itulah, maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik kegiatan pemberdayaannya itu. Suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri, yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat desa secara keseluruhan.

Pengetahuan tentang konsep pemberdayaan juga harus dipahami dengan benar oleh masyarakat, agar masyarakat mampu mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya dan memiliki daya saing untuk menghadapi persaingan pasar. Pemberdayaan masyarakat yang baik akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, bebas dari ketergantungan dan keterbelakangan, dan mampu menjadi kekuatan ekonomi di desanya.

4.4 Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat adalah satu program terobosan yang dapat dijabarkan melalui berbagai rancangan program peningkatan hidup masyarakat. Peran sentral pemerintah sangat diperlukan dan mutlak harus ada, karena pemerintah memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam mewujudkan. Tetapi juga kompetensi masyarakat juga harus disadari oleh setiap masyarakat itu sendiri guna mempermudah pelaksanaan pemberdayaan di lapangan. (Wijaya, 2010:84). Diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan tentang konsep pemberdayaan dan memiliki pemikiran yang matang untuk mengembangkan usaha, serta memiliki daya saing.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat, ia tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi adalah untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Warga masyarakat dipandang bukan sistem klien yang bermasalah, melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Hal ini terkait masih belum fokusnya penerapan pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatian pendekatan partisipatif serta membangun hubungan yang setara antara masyarakat dengan penyelenggara program.

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemukakan sebagai isu sentral pembangunan merupakan reaksi atau kenyataan munculnya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terkebelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sekaligus sebagai pelaku utama pembangunan atau dikenal dengan konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang perlu ditekankan tidak hanya pada penguatan individual tetapi juga pada kelompok.

Menurut Alfitri (2011:36) dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan pengembangan masyarakat. Penerapan pemberdayaan masyarakat yang memusatkan perhatian pendekatan partisipatif serta membangun hubungan yang setara antara masyarakat dengan penyelenggara program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kata kunci agar suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa sukses. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil kegiatan pemberdayaan secara optimal, karena kegiatan pemberdayaan tersebut hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sejalan dengan pengertian pemberdayaan di atas, kegiatan pemberdayaan harus mencakup dua kegiatan utama, yaitu :

- a. Peningkatan kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi di sini tidak terbatas pada keterlibatan dalam memberikan kontribusi dan atau pelaksanaan kegiatan, melainkan keterlibatan masyarakat secara sukarela sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- b. Pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan jejaring kelembagaan. Yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu dan atau organisasi untuk menunjukkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi-fungsinya sesuai dengan status dan peran masing-masing. Kapasitas bukan sesuatu yang pasif, melainkan merupakan bagian dari suatu proses yang berkelanjutan. Kapasitas menyangkut mutu SDM dan pemanfaatannya. Karena itu fungsi-fungsi individu dalam organisasi menjadi kata kunci yang harus diperhatikan.

Kepala desa (pemerintah desa) mempunyai kemampuan untuk menggerakkan keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Menurut Soetrisno dalam Alfitri (2011:31) keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Kerjasama ini menuntun hubungan yang setara antara rakyat dan pemerintah, oleh karena itu rakyat diupayakan memiliki kapasitas baik secara individual maupun kelembagaan. Kapasitas individual dan kelembagaan inilah yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penempatan masyarakat sebagai subyek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Dengan demikian peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan merupakan bentuk peran serta yang harus dilembagakan

dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) perlu untuk menggali potensi peran serta masyarakat dalam pembangunan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Karena dalam era pembangunan desa yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pemberdayaan, sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan ini adalah bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4 di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Ollot I belum begitu maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, masih banyak kelemahannya. Di lihat dari peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan, kepala desa masih belum dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam mengerakkan seluruh komponen, terutama tokoh masyarakat untuk ikut dalam kegiatan musyawarah pembangunan desa sebagai langkah awal untuk menampung aspirasi masyarakat dalam rangka membuat kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian peran pemerintah desa sebagai pelaksana program pemberdayaan masyarakat, masih kurang maksimal untuk menghidupkan peran kepala dusun dan tokoh masyarakat dalam menjaring aspirasi warga untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk dibawa pada musyawarah pembangunan desa. Adapun peran pemerintah desa sebagai pembina juga harus lebih diefektifkan lagi, karena keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masih rendah, masyarakat hanya mau mengikuti pelaksanaan program pemberdayaan kalau pelaksanaan di lakukan di dusunnya saja, kalau di dusun lain mereka tidak mau ikut ambil bagian di dalamnya.

2. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I lebih condong pada pembentukan sikap masyarakat terhadap program pemberdayaan, seperti kunjungan ke dasa wisma, dan ke masjid-masjid atau apabila ada kegiatan-kegiatan hajatan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa Ollot I juga melakukan kegiatan pembinaan karang taruna atau kepemudaan, pembinaan dalam bidang keagamaan bekerja sama dengan para tokoh agama, dan pembinaan dalam bidang keamanan untuk menjaga keamanan desa.

5.2 Saran

1. Pemerintah Desa Ollot I harus lebih mengintensifkan lagi koordinasinya dengan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, terutama dalam mengorganisir kerjasama dengan kepala dusun dan tokoh masyarakat, agar dapat menjadi perpanjangan kepala desa dalam menginformasikan program-program pemberdayaan dan sekaligus menanamkan rasa kebersamaan antara sesama warga desa, agar dalam pelaksanaan program pemberdayaan mendapat dukungan sepenuhnya dari semua warga masyarakat.
2. Pemerintah Desa Ollot I hendaknya lebih mengarahkan program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan yang lebih mengarah pada peningkatan keterampilan masyarakatnya, agar mereka dapat lebih mandiri dengan membuka usaha kecil untuk menambah tingkat perekonomian keluarganya.

DOKUMENTASI PENELITIAN

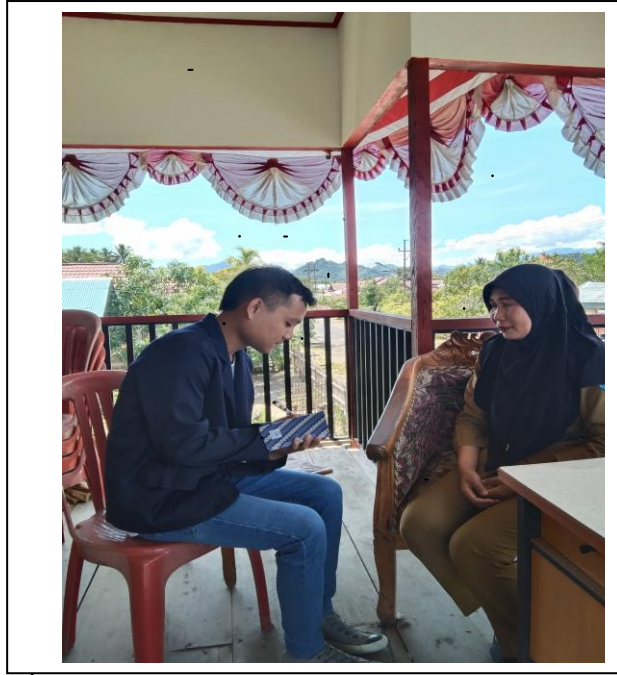
- a. Mewawancarai kepala desa terkait program-program pemberdayaan yang ada di desa



- b. Mewawancarai Aparat Desa terkait peranan kepala desa dalam pembangunan desa



- c. Mewawancarai Aparat desa tentang peranan pemerintah desa sebagai pelaksana program-program pemberdayaan yang ada di desa



- d. Mewawancarai Masyarakat terkait anggaran dana desa untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat



- e. Mewawancarai Masyarakat terkait peran kepala desa dalam program pemberdayaan



- f. Mewawancarai Masyarakat terkait peran kepala desa sebagai Pembina



- g. Mewawancarai Masyarakat terkait peran kepala desa sebagai pelaksana kebijakan



- h. Mewawancarai Masyarakat terkait peran kepala desa terkait pembangunan desa kedepannya



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Alfitri. 2011. *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Danuredjo. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni, Bandung.
- Gie, The Liang. 2007. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Haryadi, Agus. (2008). *Kemiskinan, Mentalitas Budaya atau Kepincangan Struktural?* Alfabeta, Bandung.
- Kartohadikusumo, Soetarjo. 2007. *Desa*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- Marbun, B.N. 2002. *Proses Pembangunan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Muhidin, Syarif. 2008. *Masalah-masalah Sosial*. Andika, Bandung.
- Nazir, Moh. 2006. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Strategi Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.
- Ninik, Sudarwati. 2009, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Intimedia, Malang.
- Sudriamunawar, Haryono. 2008. *Pengantar Study Administrasi Pembangunan*. Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2007. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Alfabeta, Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media, Yogyakarta.
- Suprihatini, Amin. 2009. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Cempaka Putih, Klaten.
- Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatan dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi*. Diponegoro, Semarang.
- Syafruddin, Ateng. 2007. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bina Cipta, Jakarta.

- Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ulumiah. 2012. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah dan Problematika*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2005. *Adminsitasi pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selektta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV Fokusmedia, Bandung.
- Widjaja, HAW. 2006. *Otonomi Desa*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wijaya, Mahendra. 2010. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Rineka cipta, Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4227/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Syafir Van Gobel

NIM : S2116189

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : KANTOR DESA OLLOT I KECAMATAN BOLANGITAN
 BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Judul Penelitian : PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM
 MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA OLLOT I
 KECAMATAN BOLANGITAN BARAT KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 Agustus 2022
 Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Desa Boroko Kec. Kaidipang Kode Pos 95765

REKOMENDASI

Nomor : 220/71/KBP/BMU/IX/2022

Menindaklanjuti surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 4227/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Moh. Syafir Van Gobel
 NIM : S2116189
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Alamat : Desa Ollot I, Kecamatan Bolangitang Barat.

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menempuh Ujian Skripsi Pada Universitas Ichsan Gorontalo Program Studi Ilmu Pemerintahan bertempat di Kantor Desa Ollot I, Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang di mulai dari tanggal 16 September 2022 s/d 16 Desember 2022 dengan Judul :

"Peranan Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara"

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian harus terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan tempat melaksanakan penelitian dengan menunjukkan surat rekomendasi ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan materi penelitian dan hasilnya dilaporkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati adat-istiadat setempat;
4. Memperhatikan stabilitas keamanan dilokasi dan sekitar kegiatan;
5. Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan belum selesai dapat mengajukan kembali untuk diperpanjang;
6. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan guna keperluan.

Boroko, 16 September 2022

A.n. Kepala Kantor

Kasie. Kesatuan dan Wawasan

Kebangsaan



Hamza Lantapon, S.IP

NIP. 19800313 201001 1 008

Tembusan Yth:

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
4. Kadis PMD Kab. Bolaang Mongondow Utara;
5. Camat Bolangitang Barat;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip;



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KECAMATAN BOLANGITANG BARAT
DESA OLLOT I

Jln. Desa Ollot I, Kec. Bolangitang Barat

Kode Pos : 95764

SURAT KETERANGAN

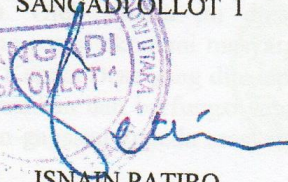
NO : 471/Olt-I/SK/226/XII/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Ollot I, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo :

Nama : Moh. Syafir Van Gobel
NIM : S2116189
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 16 September s/d 16 Desember Tahun 2022 di Desa Ollot I, Kecamatan Bolangitang Barat untuk menyusun Skripsi dengan Judul Penelitian *"Peranan Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Ollot I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ollot I, Desember 2022
SANGADI OLLOT I

ISNAIN PATIRO

ABSTRAK

MOH SYAFIR VAN GOBEL. S2116189. PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA OLLOT I KECAMATAN BOLANGITAN BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I, Kecamatan Bolagitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta memastikan indikator-indikator pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Ollot I, Kecamatan Bolagitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala Desa Ollot I, aparat desa, dan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ollot I yaitu dengan adanya Peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan dari warga dalam pembangunan Peningkatan ekonomi, SDM, meningkatkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peranan pemerintahan desa sebagai eksekutor kebijakan. Peranan pemerintahan desa sebagai Pembina. 2) Indikator pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, mengembangkan kegiatan keagamaan, pengembangan kegiatan kegiatan pemuda pemudih, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam mencapai tingkat hidup yang lebih baik.

Kata kunci: peranan, kepala desa, pemberdayaan masyarakat

ABSTRACT

MOH SHAYFIR VAN GOBEL. S2116189. THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING THE COMMUNITY OF OLLOT I VILLAGE, WEST BOLANGITAN SUB-DISTRICT, NORTH BOLAANG MONGONDOW DISTRICT

This study aims to describe the role of the village head in empowering the community of Ollot I Village, West Bolagitang Subdistrict, North Bolaang Mongondow District, and to ascertain the supporting and inhibiting indicators affecting the role of the village head in empowering the community of Ollot I Village, West Bolagitang Subdistrict, North Bolaang Mongondow District. This study is descriptive-qualitative research. The subjects of this study are the Head of Ollot I Village, village officials, and the community. The data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis is done through data display, data reduction, and conclusion drawing. The results show that: 1) The role of the village head in community empowerment in Ollot I Village can be seen in the policy implementation for the community in economic development, human resources improvement, and development of objectives of village governance. The role of the village government is as a policy executor. The role of the village government is as a coach. 2) The indicator of village community empowerment is one of the efforts to improve the welfare of the community, through several activities, including increasing the development of village economic enterprises, developing village financial institutions, developing religious activities, developing youth activities, and activities that can increase the ability of the community to increase their productivity. Therefore, in developing village communities, especially in the socio-economic field, a leader is needed, in this case, the Village Head, who is expected to function as a source of innovation, coach, direct, and function as a communicator to convey ideas to the village community, in achieving a better level of life.

Keywords: role, village head, community empowerment



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001

Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 118/FISIP-UNISAN/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.IP.,M.Si
 NIDN : 0926096601
 Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOH. SYAFIR VAN GOBEL
 NIM : S2116189
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Desa dalam
 Memberdayakan Masyarakat di Desa Ollot I
 Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang
 Mongondow Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **24%** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



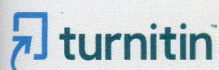
Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
 NIDN. 0913027101

Gorontalo, 12 Mei 2023
 Tim Verifikasi,



Purwanto, S.IP., M.Si
 NIDN. 0926096601

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin
 DF



Similarity Report ID: oid:25211:33438263

PAPER NAME

SkripsiKU.docx

AUTHOR

SYAFIR VAN GOBEL

WORD COUNT

7795 Words

CHARACTER COUNT

54403 Characters

PAGE COUNT

47 Pages

FILE SIZE

57.8KB

SUBMISSION DATE

Apr 2, 2023 5:40 PM GMT+7

REPORT DATE

Apr 2, 2023 5:41 PM GMT+7

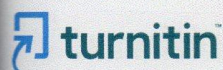
● 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)



Similarity Report ID: oid:25211:33438263

● 24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | scribd.com | 4% |
| | Internet | |
| 2 | repository.ub.ac.id | 2% |
| | Internet | |
| 3 | anggohijan.blogspot.com | 1% |
| | Internet | |
| 4 | docstoc.com | 1% |
| | Internet | |
| 5 | adoc.pub | 1% |
| | Internet | |
| 6 | e-journal.upr.ac.id | 1% |
| | Internet | |
| 7 | 123dok.com | 1% |
| | Internet | |
| 8 | text-id.123dok.com | 1% |
| | Internet | |

| | | | |
|----|--------------------------------------|----------|-----|
| 9 | eprints.uny.ac.id | Internet | <1% |
| 10 | repositori.usu.ac.id | Internet | <1% |
| 11 | ejournal.uniks.ac.id | Internet | <1% |
| 12 | core.ac.uk | Internet | <1% |
| 13 | digilib.uinkhas.ac.id | Internet | <1% |
| 14 | ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id | Internet | <1% |
| 15 | repository.umy.ac.id | Internet | <1% |
| 16 | jurnal.untan.ac.id | Internet | <1% |
| 17 | desamatuamandiri.blogspot.com | Internet | <1% |
| 18 | repository.unpad.ac.id | Internet | <1% |
| 19 | pt.scribd.com | Internet | <1% |
| 20 | id.scribd.com | Internet | <1% |

repository.unmuhjember.ac.id

<1%

Internet

repository.uin-suska.ac.id

<1%

Internet